



PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN ENERGI DI BURSA EFEK INDONESIA

Muhammad Faisal¹, Fayzah Nur Aini²

^{1,2}Universitas YARSI

Email: m.fsl@yahoo.com, nurainifayzah28@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to analyze the influence of board of commissioners' characteristics on the quality of sustainability reports in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The characteristics examined include board size, independence, gender diversity, and expertise of board members. This study employs a quantitative approach using multiple linear regression analysis, with a sample of 74 energy companies in 2023. The quality of sustainability reports is measured using a disclosure index based on the Global Reporting Initiative (GRI) standards. The findings reveal that none of the four board characteristics investigated have a significant impact on the quality of sustainability reporting. This suggests that the structural role of the board of commissioners remains suboptimal in promoting transparency and accountability in sustainability disclosures within the energy sector. Therefore, external factors such as stakeholder pressure or management commitment may play a more influential role in determining report quality. This research is expected to contribute as a reference for academics, regulators, and companies in supporting improved governance practices and sustainability reporting in Indonesia.

Keywords: board of commissioners, sustainability report, energy companies, board characteristics

ABSTRAK

Pembuatan paper ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh karakteristik dari dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karakteristik yang diteliti meliputi ukuran dewan komisaris, tingkat independensi, keberagaman gender, dan keahlian anggota dewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda, dan sampel terdiri dari 74 perusahaan energi pada tahun 2023. Kualitas laporan keberlanjutan diukur menggunakan indeks pengungkapan yang disusun berdasarkan pedoman dari standar Global Reporting Initiative (GRI). Penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa keempat karakteristik dewan komisaris yang diteliti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran struktural dewan komisaris masih belum optimal dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan di sektor energi. Oleh karena itu, faktor-faktor eksternal seperti tekanan pemangku kepentingan atau komitmen manajemen kemungkinan lebih berperan dalam menentukan kualitas pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi kalangan akademisi, regulator, maupun perusahaan dalam mendorong perbaikan praktik tata kelola serta pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: dewan komisaris, laporan keberlanjutan, perusahaan energi, karakteristik dewan komisaris

PENDAHULUAN

Industri energi memiliki peran krusial dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Namun, sektor ini juga dikritik karena dampak lingkungan yang dihasilkannya, seperti emisi karbon, sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan, dan lingkungan yang tercemar (Istiningrum, 2023). Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, banyak perusahaan di

sektor ini mulai menerapkan pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari praktik pengelolaan yang baik. Di Indonesia, kewajiban pelaporan keberlanjutan telah diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan perusahaan publik, termasuk perusahaan energi, untuk melaporkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka.

Sebagai bagian penting dari struktur tata kelola perusahaan, dewan komisaris memegang peran strategis dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan praktik transparansi. Karakteristik dewan komisaris, seperti ukuran, independensi, keberagaman gender, dan keahlian, dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan informasi yang lebih besar. Selain itu, keberagaman gender dalam dewan komisaris juga sering dikaitkan dengan peningkatan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan. (Noor William Wahyu Wicaksono Ramadhanta et al., 2024).

Namun, studi yang secara khusus meneliti hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan kualitas laporan keberlanjutan di sektor energi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana karakteristik dewan komisaris memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan memahami hubungan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi untuk akademisi, regulator, serta perusahaan energi dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi pelaporan keberlanjutan mereka.

Semoga penelitian dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kajian akademik terkait tata kelola perusahaan dan pelaporan keberlanjutan, khususnya dalam konteks industri energi di Indonesia, sehingga dapat memperluas wawasan dan memperkaya literatur di bidang tersebut. Akademisi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan tata kelola perusahaan dengan pelaporan keberlanjutan.

Lebih lanjut, peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan kualitas laporan keberlanjutan. Peneliti dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain atau memperluas cakupan sampel ke sektor lain.

Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat membantu perusahaan energi memahami pentingnya karakteristik dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan temuan ini untuk memperbaiki struktur dewan komisaris guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan.

Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengevaluasi kebijakan pelaporan keberlanjutan dan mendorong peningkatan tata kelola perusahaan di sektor energi. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa hal. Pertama, bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Kedua, bagaimana independensi dewan komisaris berperan dalam meningkatkan transparansi laporan. Ketiga, bagaimana keberagaman gender dan keahlian dewan komisaris mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik dewan komisaris dengan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, seperti manajemen perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam upaya meningkatkan transparansi dan tata kelola keberlanjutan di sektor energi.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen), di mana manajer bertanggung jawab mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Dalam konteks tata kelola perusahaan Dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya sejalan dengan kepentingan para pemegang saham. (Jensen & Meckling, 1976). Keberadaan komisaris independen dianggap dapat meminimalkan konflik keagenan dan meningkatkan transparansi, termasuk dalam pengungkapan laporan keberlanjutan.

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi dapat diartikan sebagai pengakuan legalitas yang berfungsi sebagai motivator bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja keberlanjutan mereka melalui saluran seperti laporan keberlanjutan. Teori ini menyatakan perusahaan harus beroperasi dalam batasan norma dan nilai sosial agar dapat memperoleh legitimasi dari masyarakat (Suchman, 1995). Dalam konteks perusahaan energi yang sering menghadapi kritik terkait dampak lingkungannya, pelaporan keberlanjutan menjadi alat untuk mempertahankan legitimasi tersebut. Semakin transparan suatu perusahaan dalam melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya, semakin besar kemungkinan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan (Susan McGowan, 2017).

Teori Ketergantungan Sumber Daya (*Resource Dependency Theory*)

Teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa perusahaan bergantung pada sumber daya eksternal untuk keberlanjutan operasionalnya, termasuk sumber daya manusia dalam dewan komisaris (Pfeffer & Salancik, 1978). Keberagaman dalam dewan komisaris, seperti latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang keuangan dan keberlanjutan, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan. Dewan komisaris yang memiliki beragam keahlian diharapkan mampu mengidentifikasi risiko keberlanjutan dan mengarahkan perusahaan untuk lebih aktif dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman dan keahlian dewan komisaris di bidang keuangan berkorelasi positif dengan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan energi (Ahmad et al., 2018).

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori ini menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya tertuju pada pemegang saham, melainkan juga meliputi seluruh pemangku kepentingan yang terdampak oleh kegiatan operasional perusahaan. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi karyawan, konsumen, pemerintah, masyarakat luas, serta lingkungan hidup. Teori ini menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pihak tersebut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas pelaporan keberlanjutan dipandang sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap tuntutan berbagai kelompok kepentingan tersebut (Freeman & McVea, 2005). Dalam konteks ini, karakteristik dewan komisaris menjadi penting karena mereka berfungsi sebagai perwakilan utama dalam menjembatani kepentingan manajemen dengan pemangku kepentingan eksternal. Dewan komisaris yang lebih beragam dan berpengalaman diharapkan lebih peka terhadap tekanan dari pemangku kepentingan dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam laporan keberlanjutan (Mitchell et al., 1997).

Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Institutional theory menyatakan bahwa perusahaan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan tekanan eksternal dari institusi seperti regulator, asosiasi industri, dan masyarakat. Dalam upaya

mempertahankan legitimasi institusional, perusahaan akan mengikuti praktik yang dianggap standar atau mapan, termasuk dalam pelaporan keberlanjutan (DiMaggio & Powell, 1983) Karakteristik dewan komisaris yang sesuai dengan ekspektasi institusional seperti adanya komisaris independen atau keberagaman gender dapat dipandang sebagai strategi simbolik untuk menunjukkan kepatuhan terhadap norma tata kelola yang diharapkan, sehingga memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Dewan komisaris sangat dibutuhkan dalam memastikan bisnis mengikuti tata kelola yang benar, khususnya terkait pendaftaran dan transparansi. Semakin banyak anggota dewan, semakin banyak peluang dan pengalaman yang dapat mereka berikan untuk pengawasan perusahaan. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa dewan yang lebih besar dapat meningkatkan kualitas langganan karena lebih banyak ulasan meningkatkan perdebatan dan pilihan yang berkaitan dengan transparansi. (Githaiga & Kosgei, 2023; Kılıç & Kuzey, 2019)

Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan dengan dewan yang lebih besar mungkin lebih berkomitmen dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan demi mempertahankan reputasi dan kepercayaan publik (Kumar Kishore et al., 2022). Namun, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa dewan yang terlalu besar bisa menghambat pengambilan keputusan karena koordinasi yang lebih sulit dan proses diskusi yang lebih panjang (Beasley Mark, 1996; Puspitasari & Ernawati, 2010). Dalam beberapa kasus, struktur dewan yang terlalu besar justru bisa mengurangi efektivitas pengawasan karena keputusan menjadi kurang fokus dan cenderung terfragmentasi (Elaigwu et al., 2024).

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Independensi dewan komisaris merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas pengawasan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat bertindak lebih objektif dalam mengawasi kinerja manajemen, termasuk dalam hal transparansi dan pelaporan keberlanjutan. Teori keagenan menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen berperan dalam meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. sehingga meningkatkan transparansi perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Beberapa penelitian mendukung argumen ini. Misalnya, studi oleh (Khan et al., 2012) menemukan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan. Komisaris independen dianggap lebih berpihak kepada kepentingan pemegang saham dan publik, sehingga mereka mendorong perusahaan untuk memberikan laporan keberlanjutan yang lebih akurat dan informatif (Michelon & Parbonetti, 2012).

Namun, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa komisaris independen bisa saja tidak terlalu efektif jika mereka kurang memahami sektor industri perusahaan tersebut atau jika peran mereka hanya bersifat formalitas tanpa kewenangan yang cukup (Prado-Lorenzo & Garcia-Sanchez, 2010). Oleh karena itu, meskipun independensi dewan komisaris secara teori diharapkan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, efektivitasnya tetap bergantung pada faktor lain, seperti keahlian dan pengalaman anggota dewan tersebut.

H2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Keberagaman Gender terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan Keberagaman gender dalam dewan komisaris semakin mendapat perhatian dalam penelitian tata kelola perusahaan, terutama karena perempuan sering dikaitkan dengan peningkatan kepedulian terhadap

isu sosial dan lingkungan. Dalam teori legitimasi, keberagaman gender dianggap dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan, sehingga mendorong transparansi yang lebih besar dalam laporan keberlanjutan (Liao et al., 2015).

Penelitian sebelumnya menginformasikan bahwa kehadiran wanita dalam dewan komisaris berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan keberlanjutan. Perempuan cenderung sering memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memiliki kecenderungan untuk lebih teliti dalam mengawasi kebijakan perusahaan terkait isu keberlanjutan (Bear et al., 2010; Rao & Tilt, 2016). Studi yang dilakukan oleh (García-Sánchez et al., 2019) juga menemukan bahwa perusahaan dengan lebih banyak perempuan dalam dewan komisaris memiliki laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan transparan.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dampak keberagaman gender bisa bergantung pada konteks budaya dan lingkungan regulasi perusahaan. Di beberapa negara atau industri tertentu, peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas, sehingga dampaknya terhadap transparansi pelaporan bisa bervariasi (Adams & Ferreira, 2008).

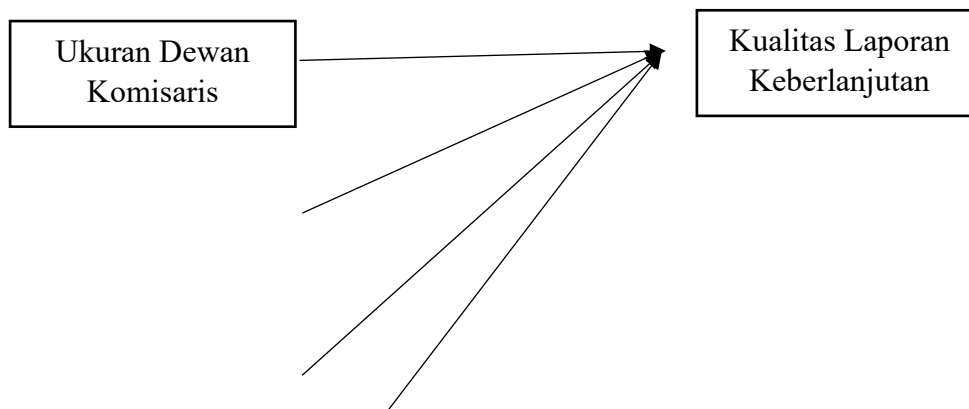
H3: Keberagaman gender dalam susunan dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Kemampuan anggota dewan komisaris, khususnya di bidang keuangan, hukum, dan keberlanjutan, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen serta memastikan laporan keberlanjutan disusun secara lebih transparan dan akurat. Dalam teori ketergantungan sumber daya, disebutkan bahwa dewan komisaris memiliki latar belakang keahlian yang beragam bisa memberi bantuan ke perusahaan dalam mengakses informasi dan sumber daya eksternal yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelaporan (Pfeffer & Salancik, 1978). Penelitian menunjukkan kalau dewan komisaris yang memiliki anggota dengan keahlian di bidang keberlanjutan atau tata kelola lingkungan lebih sering mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas. Selain itu, pengalaman dalam bidang keuangan juga dianggap penting, karena anggota dewan dengan latar belakang ini dapat lebih memahami implikasi finansial dari kebijakan keberlanjutan dan memastikan bahwa pelaporan dilakukan secara akurat (Ahmad et al., 2018) Namun, efektivitas keahlian dalam dewan komisaris juga bergantung pada sejauh mana anggota dewan tersebut benar-benar terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan bukan sekadar menjadi simbol keberagaman tanpa peran aktif (Fama & Jensen, 1983).

H4: Keahlian dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

METODE



Independensi
Dewan Komisaris

Keberagaman
Dewan Komisaris

Keahlian Dewan
Komisaris

PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode regresi linear berganda guna menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pendekatan ini dipilih peneliti karena memungkinkan dilakukannya pengukuran secara objektif serta menghasilkan temuan yang sistematis dan terukur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan selama periode observasi. Populasi penelitian mencakup hampir seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perusahaan harus tercatat di BEI sepanjang periode penelitian, secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan selama periode tersebut, serta laporan tahunan atau laporan keberlanjutan harus memuat informasi yang lengkap mengenai karakteristik dewan komisaris. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), website resmi masing-masing perusahaan. Serta data dari basis pelaporan keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative (GRI) apabila tersedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengekstraksi informasi yang relevan sesuai dengan variabel penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen yang digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Variabel dependen adalah kualitas laporan keberlanjutan (SRQ) yang diukur menggunakan indeks pengungkapan berbasis GRI Standards. Pengukuran dilakukan dengan menghitung proporsi jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan terhadap total item yang terdapat dalam indeks pengungkapan. Sementara itu, variabel independen dalam penelitian ini mencakup ukuran dewan komisaris, yang diukur berdasarkan banyaknya anggota dewan komisaris yang tercatat dalam struktur organisasi perusahaan. (Kılıç & Kuzey, 2019); Independensi dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota komisaris independen yang terdapat dalam struktur dewan tersebut. (Khan et al., 2012); keberagaman gender dalam dewan komisaris, yang diproksikan berdasarkan variabel dummy di mana jumlah perempuan diberikan angka 1 sedangkan laki-laki diberikan angka 0 (Shamil et al., 2014) serta keahlian dewan komisaris, yang diukur berdasarkan persentase anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang di bidang keuangan, akuntansi, atau keberlanjutan (Ahmad et al., 2018)

Sebagai langkah awal sebelum pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif guna memberikan pemahaman umum mengenai karakteristik data sampel, termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel. Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dasar dalam regresi linear berganda, yang mencakup: uji normalitas untuk menilai apakah residual memiliki distribusi normal; uji multikolinearitas untuk mendeteksi kemungkinan adanya korelasi tinggi antar variabel independen; uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varians residual bersifat homogen; serta uji autokorelasi guna mengetahui apakah terdapat hubungan sistematis antar residual dari pengamatan yang berdekatan. Analisis utama dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$SRQ = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 BIND + \beta_3 BGEN + \beta_4 BEXP + \varepsilon$$

Deskripsi:

SRQ = Kualitas laporan keberlanjutan

BSIZE = Ukuran dewan komisaris

BIND = Independensi dewan komisaris

BGEN = Gender dewan komisaris

BEXP = Keahlian dewan komisaris

ε = Kesalahan

Dalam rangka menguji hipotesis, penelitian ini memanfaatkan uji t untuk menganalisis dampak individu dari setiap variabel independen terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sementara itu, uji F dipakai untuk mengevaluasi pengaruh kolektif seluruh variabel independen secara bersamaan. Di samping itu, koefisien determinasi (R^2) dimanfaatkan guna mengukur proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model melalui variabel-variabel independen. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan bukti empiris terkait pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan energi di Indonesia.

HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASA

<i>VAR</i>	<i>Mean</i>	<i>Std.dev</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
SRQ	2.18	0.26	1.67	2.88
BSIZE	3.61	1.695	2	8
BIND	1.57	0.908	1	4
BGEN	0.34	0.476	0	1
BEXP	1.88	1.238	0	5

Tabel 1. Statistik deskriptif

Catatan: SRQ merupakan kualitas laporan keberlanjutan yang diukur menggunakan skor berdasarkan pedoman Global Reporting Initiative (GRI); BGEN diukur berdasarkan jumlah anggota komisaris perempuan yang ada di setiap perusahaan; BIND menunjukkan independensi dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan; BSIZE merupakan ukuran dewan komisaris yang diukur berdasarkan jumlah total anggota dewan komisaris; sedangkan BEXP adalah pengalaman dewan komisaris yang diukur berdasarkan proporsi anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan.

Berdasarkan Tabel 1, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitas laporan keberlanjutan (SRQ), diukur berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap standar GRI. Rata-rata skor SRQ tercatat sebesar 2,18 Dari total skor maksimal sebesar 4,87, nilai tersebut tergolong rendah karena belum mencapai setengah dari skor tertinggi yang dapat dicapai. Salah satu

penyebabnya kemungkinan adalah proses transisi menuju penerapan GRI Standards 2021, yang mulai diberlakukan untuk laporan tahun 2023. Perubahan struktur serta pendekatan materialitas dalam standar baru ini mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan diri, dan banyak di antaranya masih dalam tahap adaptasi, sehingga pelaporan mereka belum sepenuhnya sesuai dengan standar tersebut. Standar deviasi variabel SRQ sebesar 0,26, yang menunjukkan bahwa variasi antarperusahaan tidak terlalu besar. Skor terendah dicatatkan oleh PT Sumber Energi Andalan pada tahun 2023 dengan nilai 1,67. Hal ini diduga disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan tersebut masih berada pada tahap awal dalam penerapan standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutannya. Sementara itu, nilai tertinggi SRQ sebesar 2,88 diperoleh oleh PT Harum Energy pada tahun yang sama. Pencapaian ini disebabkan oleh penggunaan pendekatan pelaporan GRI dengan opsi komprehensif, yang mencakup seluruh elemen pelaporan baik yang bersifat inti maupun tambahan. Selain itu, kualitas laporan keberlanjutan perusahaan ini juga didukung oleh penggunaan jasa verifikasi dari pihak ketiga (asuror eksternal).

Variabel independen pertama, yaitu ukuran dewan komisaris (BSIZE), diukur berdasarkan jumlah total anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Rata-rata nilai BSIZE tercatat sebesar 3,61, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki sekitar 3 hingga 4 orang komisaris. Standar deviasi sebesar 1,695 menunjukkan bahwa variasi jumlah anggota komisaris antarperusahaan relatif rendah, atau dengan kata lain, distribusi data cukup terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Nilai terendah untuk BSIZE adalah 2, yang ditemukan pada PT Ratu Prabu Energi Tbk dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, keduanya pada tahun 2023. Mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dalam Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Komisaris dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jumlah komisaris minimal yang diwajibkan adalah dua orang. Dengan demikian, seluruh perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini telah memenuhi persyaratan regulasi tersebut. Sementara itu, nilai maksimum BSIZE adalah 8, yang ditemukan pada PT Baramulti Suksessarana Tbk pada tahun 2023. Perusahaan ini secara eksplisit menyebutkan dalam laporan tahunan bahwa jumlah anggota komisaris mereka sebanyak delapan orang.

Variabel independen kedua, yaitu independensi dewan komisaris (BIND), diukur berdasarkan jumlah anggota komisaris independen yang terdapat dalam struktur dewan komisaris perusahaan. Nilai rata-rata variabel ini sebesar 1,57, yang menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan dalam sampel memiliki sekitar satu hingga dua orang komisaris independen. Standar deviasi variabel ini adalah 0,908, yang mengindikasikan adanya tingkat variasi yang cukup tinggi dalam jumlah komisaris independen antar perusahaan pada sampel penelitian. Nilai minimum BIND, yaitu sebesar 1, tercatat pada PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2023. yang mempunyai 1 dewan komisaris independen dari 2 dewan komisaris. Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, perusahaan publik diwajibkan menunjuk Komisaris Independen dengan proporsi paling sedikit 30% dari seluruh anggota dewan komisaris, apabila jumlah anggota dewan komisaris melebihi dua orang. Dari hal tersebut maka perusahaan perusahaan yang dijadikan sampel sudah memenuhi aturan. Nilai maksimum variabel BIND adalah 4, dan nilai ini diperoleh oleh PT dian swastatika sentosa yang memiliki empat dari seluruh anggota dewan komisarisnya berstatus independen.

Variabel independen ketiga, yaitu keberagaman gender (BGEN), diukur berdasarkan jumlah anggota komisaris perempuan yang ada di setiap perusahaan. Nilai rata-rata variabel ini adalah 0,34, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, sekitar 34% dari anggota komisaris perusahaan dalam sampel merupakan perempuan. Temuan ini mencerminkan bahwa keberagaman gender dalam struktur dewan komisaris masih sangat terbatas, di mana posisi komisaris di industri energi

di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Nilai standar deviasi variabel BGEN sebesar 0,476 tergolong tinggi karena melebihi nilai rata-rata variabel, yang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar antarperusahaan dalam hal representasi gender. Selain itu, nilai minimum variabel BGEN adalah 0, yang ditemukan pada sejumlah perusahaan dalam sampel. Kondisi ini menandakan bahwa pada tahun 2023, sebagian besar perusahaan energi belum melibatkan perempuan dalam jajaran dewan komisaris mereka. Nilai maksimum variabel BGEN dari hasil penelitian ini adalah 1, yang menginformasikan bahwa perusahaan dengan jumlah komisaris perempuan terbanyak dalam sampel hanya memiliki satu orang perempuan dalam jajaran komisaris. Meskipun jumlah total anggota komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut bervariasi antara tiga hingga delapan orang, namun keberadaan perempuan di posisi tersebut masih sangat terbatas, yaitu tidak lebih dari satu orang di setiap perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa representasi gender perempuan dalam komisaris masih sangat rendah, meskipun tidak ada aturan di Indonesia yang secara eksplisit mewajibkan keberagaman gender dalam struktur komisaris.

Variabel independen keempat, yaitu pengalaman dewan komisaris (BEXP), diukur berdasarkan jumlah anggota komisaris yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Nilai rata-rata variabel ini adalah 1,88, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap perusahaan dalam sampel memiliki sekitar satu hingga dua orang komisaris dengan latar belakang di bidang akuntansi atau keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor energi di Indonesia cenderung menempatkan individu dengan keahlian atau pengalaman di bidang akuntansi dan keuangan dalam jajaran dewan komisaris. Nilai standar deviasi sebesar 1,238 menunjukkan variasi yang relatif rendah, yang mengisyaratkan bahwa tren ini cukup konsisten di antara perusahaan-perusahaan yang diteliti. Nilai minimum BEXP yang diperoleh adalah 0 dan didapat dari PT AKR Corporindo Tbk dan Ratu Prabu Energi Tbk Sedangkan, Nilai maksimum variabel BEXP adalah 5, yang dicapai PT resource alam indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh komisarisnya memiliki pengalaman atau latar belakang profesional di bidang keuangan dan akuntansi.

HASIL DAN UJI HIPOTESIS

Setelah uji asumsi klasik dilakukan dan tidak ditemukan pelanggaran yang berarti, maka pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil uji terhadap masing-masing variabel independen disajikan sebagai berikut.

<i>Variables</i>	<i>Sig Coefficient</i>
BSIZE	0.948 +0.002
BIND	0.705 +0.024
BGEN	0.309 +0.069
BEXP	0.942 -0.002

Hipotesis 1: Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan menunjukkan hasil positif (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak).

Ukuran dewan komisaris (BSIZE) memiliki nilai koefisien sebesar 0,002 dengan signifikansi 0,948 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki arah pengaruh positif, namun tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, hipotesis mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris tidak didukung oleh data dan dinyatakan ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan-

perusahaan di sektor energi belum menjadi faktor yang menentukan dalam mendorong penerapan kebijakan pelaporan keberlanjutan, sehingga hasil tersebut tidak sejalan dengan kerangka teori legitimasi. Kemungkinan, kualitas laporan keberlanjutan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar karakteristik dewan komisaris, seperti komitmen manajemen atau tekanan dari pemangku kepentingan eksternal. Hal ini juga tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana variabel lain yang mewakili karakteristik dewan komisaris, seperti keahlian, independensi, dan keberagaman gender, juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. Lebih lanjut lagi (Alshbili et al., 2020) berpendapat bahwa di negara berkembang, ukuran dewan komisaris yang besar kemungkinan lebih difokuskan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis perusahaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengungkapan isu lingkungan dan sosial. Hal ini dapat menjelaskan mengapa, dalam konteks perusahaan energi di Indonesia, ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan.

Hipotesis 2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan. (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak)

Independensi dewan komisaris (BIND) menunjukkan arah pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan dengan nilai koefisien sebesar 0,024. Namun, nilai signifikansinya sebesar 0,705 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan tidak dapat diterima. Temuan ini mengisyaratkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam mendorong peningkatan kualitas pelaporan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan di sektor energi. Meskipun secara teoritis komisaris independen diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan memperkuat transparansi, peran tersebut tampaknya belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum berjalan secara optimal dalam konteks perusahaan yang menjadi sampel. Menurut (Hamidah & Arisukma, 2020) Perusahaan mungkin menganggap bahwa keberadaan anggota dewan komisaris independen sudah cukup memberikan citra positif kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu menyajikan laporan keberlanjutan secara menyeluruh. Dengan mematuhi regulasi yang mewajibkan adanya komisaris independen, perusahaan beranggapan telah menunjukkan komitmen tata kelola yang baik, sehingga pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif tidak lagi dipandang sebagai prioritas utama. (Behl et al., 2022) Pengangkatan anggota dewan komisaris independen dalam beberapa kasus cenderung dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh regulasi, bukan karena adanya dorongan internal perusahaan untuk memperkuat fungsi pengawasan secara substansial. Dengan kata lain, keberadaan komisaris independen lebih bersifat simbolis sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, daripada dimaksudkan untuk benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi perusahaan.

Hipotesis 3: Keberagaman gender dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak)

Berdasarkan hasil analisis regresi, keberagaman gender dalam dewan komisaris menunjukkan arah pengaruh yang positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan, dengan koefisien sebesar 0,069. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,309 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif keberagaman gender terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan tidak dapat diterima. menurut (Karuhanga, 2010) dari sudut pandang budaya, khususnya di negara berkembang, peran

perempuan dalam dewan komisaris masih sering terbatas secara fungsional. Hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan hanya sebatas pemenuhan simbolis atau formalitas (tokenisme), bukan sebagai aktor pengambil keputusan yang substansial. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman gender belum sepenuhnya mencerminkan prinsip legitimasi dalam konteks pelaporan keberlanjutan. Tidak signifikannya pengaruh ini juga mungkin disebabkan oleh rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi dalam dewan komisaris di sebagian besar perusahaan. Jumlah yang terbatas tersebut belum mencapai ambang batas atau *critical mass* yang diperlukan agar kehadiran mereka dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap arah kebijakan dan keputusan perusahaan, termasuk dalam hal pelaporan keberlanjutan (Joecks et al., 2013). Kesenjangan gender dalam struktur organisasi masih dapat dijumpai, Salah satu faktor yang mungkin memengaruhi hal tersebut adalah adanya anggapan bahwa perempuan memiliki latar pendidikan dan pengalaman di dunia kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan ini dapat memengaruhi penempatan perempuan dalam posisi strategis, termasuk dalam struktur dewan komisaris. Pandangan ini berkontribusi pada terbatasnya peluang perempuan untuk menempati posisi strategis, termasuk dalam jajaran dewan komisaris (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Kondisi ini juga tercermin dari belum adanya ketentuan khusus di Indonesia, termasuk dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan keberadaan minimal satu perempuan dalam struktur dewan komisaris perusahaan publik. Selain itu, sebanyak 49 dari 74 perusahaan yang menjadi bahan sampel dalam penelitian ini tidak punya komisaris perempuan dalam jajaran dewan komisarisnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023, mayoritas perusahaan masih belum memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis di level pengawasan perusahaan.

Hipotesis 4: Keahlian dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan (Tidak signifikan, Sehingga Hipotesis di tolak)

Keahlian dewan komisaris (BEXP) memiliki arah pengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan dengan koefisien sebesar -0.002. Namun, nilai signifikansinya sebesar 0.942 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis mengenai pengaruh keahlian dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa jenis pendidikan yang ditempuh oleh anggota dewan, khususnya apakah berasal dari bidang bisnis atau non-bisnis, belum menjadi faktor yang menentukan dalam peningkatan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tanputra et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kualitas institusi pendidikan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan bidang studi itu sendiri. Selain itu (García-Meca & Palacio, 2018) juga menyatakan bahwa keberagaman latar belakang pendidikan dalam dewan, termasuk dari disiplin ilmu non-bisnis, dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendukung pengambilan keputusan strategis secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, tidak signifikan-nya hasil pengujian ini dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa latar pendidikan non-bisnis pun tetap dapat memberikan kontribusi berarti dalam fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Karakteristik yang dikaji meliputi ukuran dewan komisaris, tingkat independensi, keberagaman gender, dan keahlian anggota dewan. Penelitian ini memakai metode regresi linear berganda dengan jumlah total sampel sebanyak 74 perusahaan pada tahun 2023.

Hasil analisis menginformasikan bahwa keempat variabel independen tersebut ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Artinya, secara statistik, ukuran, keberagaman, independensi, maupun keahlian dewan komisaris belum terbukti memengaruhi seberapa baik perusahaan menyusun dan menyajikan laporan keberlanjutan sesuai dengan standar GRI. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur formal dewan komisaris belum cukup kuat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan di sektor energi.

Kemungkinan lain yang mendasari hasil ini adalah karena pelaporan keberlanjutan masih lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan pemangku kepentingan, regulasi industri, atau bahkan komitmen dari manajemen tingkat atas. Selain itu, kehadiran anggota dewan komisaris dengan latar belakang pendidikan atau keahlian tertentu belum tentu menjamin keterlibatan aktif mereka dalam isu-isu keberlanjutan, terutama jika pelaporan keberlanjutan masih dianggap sekadar kewajiban administratif.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, cakupan data hanya terbatas pada satu tahun pengamatan, yaitu tahun 2023, sehingga belum memungkinkan untuk melihat pengaruh jangka panjang atau pola konsistensi antarperiode. Kedua, jumlah sampel yang terbatas hanya pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI juga menjadi kendala dalam memperluas generalisasi hasil penelitian ini ke sektor atau wilayah lain. Ketiga, pengukuran karakteristik dewan dilakukan secara kuantitatif tanpa mempertimbangkan dinamika internal, Kualitas intraksi serta pengaruh informal yang berpotensi muncul saat proses pengambilan keputusan di tingkat dewan komisaris. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih panjang (panel data), memperluas cakupan sektor industri, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti keterlibatan dewan dalam komite keberlanjutan atau frekuensi rapat yang membahas isu ESG secara spesifik.

REFERENSI

- Adams, R., & Ferreira, D. (2008). *Women in the Boardroom and Their Impact on Governance and Performance*.
http://ssrn.com/abstract_id=1107721 www.ecgi.org/wpElectroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1107721
- Ahmad, N. B. J., Rashid, A., & Gow, J. (2018). Corporate board gender diversity and corporate social responsibility reporting in Malaysia. *Gender, Technology and Development*, 22(2), 87–108. <https://doi.org/10.1080/09718524.2018.1496671>
- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Beddewela, E. (2020). Ownership types, corporate governance and corporate social responsibility disclosures: Empirical evidence from a developing country. *Accounting Research Journal*, 33(1), 148–166. <https://doi.org/10.1108/ARJ-03-2018-0060>
- Bear, S., Rahman, N., & Post, C. (2010). The Impact of Board Diversity and Gender Composition on Corporate Social Responsibility and Firm Reputation. *Journal of Business Ethics*, 97(2), 207–221. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0505-2>
- Beasley Mark. (1996). An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review*, 71, 443–465.
- Behl, A., Kumari, P. S. R., Makhija, H., & Sharma, D. (2022). Exploring the relationship of ESG score and firm value using cross-lagged panel analyses: case of the Indian energy sector. *Annals of Operations Research*, 313(1), 231–256. <https://doi.org/10.1007/s10479-021-04189-8>

- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Elaigwu, M., Ugwu, J. I., Alghorbany, A., Ngwoke, O. M., Ude, A. O., Desmond, O. C., & Audu, P. (2024). Sustainability disclosure quality of Nigerian listed firms: the role of female leadership, board communication, and external assurance. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2376774>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. In *Source: Journal of Law and Economics* (Vol. 26, Issue 2).
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*, March. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- García-Meca, E., & Palacio, C. J. (2018). Board composition and firm reputation: The role of business experts, support specialists and community influentials. *BRQ Business Research Quarterly*, 21(2), 111–123. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2018.01.003>
- García-Sánchez, I.-M., Suárez-Fernández, O., & Martínez-Ferrero, J. (2019). Female directors and impression management in sustainability reporting. *International Business Review*, 28(2), 359–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2018.10.007>
- Githaiga, P. N., & Kosgei, J. K. (2023). Board characteristics and sustainability reporting: a case of listed firms in East Africa. *Corporate Governance (Bingley)*, 23(1), 3–17. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2021-0449>
- Hamidah, & Arisukma, A. A. (2020). The influence of corporate governance on sustainability report management: The moderating role of audit committee. *Polish Journal of Management Studies*, 21(1), 146–157. <https://doi.org/10.17512/pjms.2020.21.1.11>
- Istiningrum, A. A. (2023). KINERJA LINGKUNGAN DAN PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DI INDONESIA. *Sebatik*, 27(1), 183–192. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2018>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Joecks, J., Pull, K., & Vetter, K. (2013). Gender Diversity in the Boardroom and Firm Performance: What Exactly Constitutes a “Critical Mass?” *Journal of Business Ethics*, 118(1), 61–72. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1553-6>
- Karuhanga, B. N. (2010). 기사 (Article) 와 안내문 (Information) [. *The Eletronic Library*, 34(1), 1–5.
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2012). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2050630>
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2019). The effect of corporate governance on carbon emission disclosures: Evidence from Turkey. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 11(1), 35–53. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-07-2017-0144>
- Kumar Kishore, Kumari Ranjita, Nandy Monomita, Sarim Mohd, & Kumar Rakesh. (2022). Do ownership structures and governance attributes matter for corporate sustainability reporting? An examination in the Indian context. *Management of Environmental Quality*. <https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/24211>
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2015). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. *The British Accounting Review*, 47(4), 409–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.01.002>

- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The effect of corporate governance on sustainability disclosure. *Journal of Management and Governance*, 16(3), 477–509. <https://doi.org/10.1007/s10997-010-9160-3>
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886. <https://doi.org/10.5465/AMR.1997.9711022105>
- Noor William Wahyu Wicaksono Ramadhanta, Kurniadi Nicholas, Gunawan Vania Pradipta, & Ludji Theodorus Radja. (2024). Pengaruh_Karakteristik_Dewan_Terhadap_Kualitas_Pel. *Nominal*, 13, 40–56.
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. Harper & Row. <https://books.google.co.id/books?id=9d-3AAAAIAAJ>
- Prado-Lorenzo, J. M., & Garcia-Sanchez, I. M. (2010). The Role of the Board of Directors in Disseminating Relevant Information on Greenhouse Gases. *Journal of Business Ethics*, 97(3), 391–424. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0515-0>
- Puspitasari, F., & Ernawati, E. (2010). PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA. In *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Tahun* (Vol. 3, Issue 2). www.swa.co.id
- Rao, K., & Tilt, C. (2016). Board Composition and Corporate Social Responsibility: The Role of Diversity, Gender, Strategy and Decision Making. *Journal of Business Ethics*, 138(2), 327–347. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2613-5>
- Shamil, M. M., Shaikh, J. M., Ho, P. L., & Krishnan, A. (2014). The influence of board characteristics on sustainability reporting Empirical evidence from Sri Lankan firms. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97. <https://doi.org/10.1108/ARA-09-2013-0060>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Tanputra, S., Harymawan, I., & Nasih, M. (2023). Board of Commissioners Educational Background And Sustainability Report Quality. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(2), 153–165. <https://doi.org/10.15294/jda.v15i2.42263>